



LAPORAN AKHIR KEGIATAN

Tema Paket 5 Dukungan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

JUDUL:

**PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT UNTUK DAPAT MENGELOLA KAWASAN PERIKANAN DI
KAWASAN KONSERVASI DAN MELAKUKAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT DI
RAJA AMPAT DAN LAUT SAWU**

Disusun oleh:

Yayasan TERANGI

Didukung oleh:

Program Hibah COREMAP-CTI World Bank

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Alamat Lembaga:

Jl. Asyibaniah No 106. Kelurahan Pondok Jaya. Cipayung- Depok

(April, 2022)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
1. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan dan Sasaran	4
1.3. Ruang Lingkup pekerjaan	4
1.4. Metodologi	4
1.5 Informasi Ringkas Organisasi dan proyek.....	5
2. PELAKSANAAN PROGRAM.....	6
2.1 Kerangka Kerja (<i>Logical Framework</i>).....	6
2.2. Kemajuan dan Pencapaian Masing-masing Output	11
2.2. Hambatan dalam Pencapaian output dan Upaya Mengatasi	17
2.4. Penyerapan Anggaran	18
3. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROYEK.....	25
3.1. Dampak proyek terhadap masyarakat/pemerintah/lingkungan	25
3.2. Strategi keberlanjutan proyek.....	25
4. INOVASI DAN TEROBOSAN	25
5. PEMBELAJARAN	26
6. REKOMENDASI PENTING SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL/OUTPUT SETELAH PROGAM BERAKHIR DAN TANTANGANNYA	26
Lampiran 1. Daftar publikasi/produk komunikasi yang dihasilkan	27
Lampiran 2. Ringkasan hasil identifikasi POKMASWAS dan Statusnya	35
Lampiran 3. Sampul depan hasil laporan Pengawasan POKMASWAS	36
Lampiran 4. Contoh pengisian log book oleh pokmaswas.	37
Lampiran 5. Kapal dari NTB yang didindikasikan menangkap ikan dengan cara merusak	38
Lampiran 6. Pembersihan Sampah di Pesisir	39
Lampiran 7. Pelatihan Selam tingkat dasar kepada masyarakat staf daerah dan staf nasional di Kupang.	40
Lampiran 8. Workshop Pemantauan Ekosistem Pesisir di Raja Ampat dan Kupang.	41

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dua kawasan penting bagi konservasi perairan di Indonesia adalah Kawasan Raja Ampat dan Taman Nasional Laut Sawu. Raja Ampat karena masih terjaga dan menjadi rumah bagi berbagai biota laut dan keanekaragaman hayati laut yang penting. Taman Nasional Laut Sawu merupakan taman nasional laut terbesar di Indonesia.

Relasi masyarakat terhadap kedua kawasan ini berbeda. Di Raja Ampat, masyarakat adat memiliki ketergantungan dan kedekatan dengan laut. Aturan adat tidak hanya mencakup kawasan terrestrial tapi juga berlaku di laut. Aturan adat bisa digunakan untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut yang lestari. Di Laut Sawu, masyarakat asli tidak terlalu memanfaatkan laut, namun sejumlah pendatang mulai berusaha di sektor perikanan dan memanfaatkan sumber daya laut. Pengelolaan TN Laut Sawu dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN), sebuah lembaga pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Provinsi NTT.

Tingkatan tertinggi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah ketika masyarakat sudah merasakan manfaat konservasi dan terlibat dalam pengelolaan. Untuk menuju hal tersebut diperlukan program penguatan untuk mendorong masyarakat mampu mendapat manfaat dari keberadaan kawasan konservasi. Prasyarat bagi hal tersebut adalah terbentuknya kelembagaan masyarakat yang baik dan kapabel baik dalam pengelolaan maupun dalam pengawasan (terukur dari keberadaan rencana pengelolaan, rencana pemanfaatan, dan model bisnis), serta adanya kepastian legal tentang pengaturan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di kedua kawasan itu.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Proyek ini bertujuan untuk mendukung penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam pengawasan kawasan konservasi

Sasaran :

- a. Penguatan kelembagaan pengawasan Kawasan konservasi berbasis masyarakat
- b. Terbangunnya kapasitas untuk menuju keberlanjutan kelembagaan POKMASWAS
- c. Tersedianya dukungan sarana, prasarana dan operasional POKMASWAS
- d. Pengembangan pengawasan bersama
- e. Pengawasan implementasi proyek untuk mendukung capaian tujuan
- f. Pengelolaan proyek untuk mencapai tujuan proyek

1.3. Ruang Lingkup pekerjaan

Lingkup kegiatan ini, adalah:

- a. Penguatan kelembagaan melalui registrasi kelompok
- b. Pelatihan pengawasan berbasis masyarakat, pendanaan berkelanjutan dan juga pelatihan selam lanjutan
- c. Pengadaaan sarana dan prasarana pengawasan
- d. Pengembangan pengawasan bersama
- e. Fasilitasi rapat koordinasi
- f. Monitoring dan evaluasi

1.4. Metodologi

Metodologi dan strategi i pendekatan yang dijalankan oleh TERANGI adalah sebagai berikut :

- a) FGD dilakukan untuk memperkuat legalitas POKMASWAS dalam proses pembentukan legalitas serta pembentukan jejaring POKMASWAS. Diharapkan dengan pendekatan dan metode yang digunakan ini dapat menjangkau seluruh masukan serta saran yang dibutuhkan dari seluruh pihak terkait dalam hal penguatan legalitas pokmaswas di daerah masing-masing.
- b) Pemetaan partisipatif dilakukan untuk assessment area pengawasan masing-masing pokmaswas. Dengan assesmen ini akan didapatkan keluaran berupa peta area pengawasan yang menjadi ruang kerja bagi pokmaswas di masing-masing daerah.
- c) Metode Workshop dipilih untuk pengembangan kapasitas SDM dalam hal Pemantauan ekosistem pesisir, rehabilitasi kawasan, pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi. Dengan metode ini diharapkan pengembangan kapasitas dapat berlangsung lebih interaktif dan efektif. Kami paham bahwa masing-masing daerah interfensi memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu diskusi interaktif dapat menjawab permasalahan serta kebutuhan di masing-masing lokasi interfensi.
- d) Sertifikasi berbasis kompetensi sesuai standart nasional (SSKNI maupun SK3) diaplikasikan setelah terlaksananya workshop. Hal ini untuk menjawab efektifitas dari kegiatan peningkatan kapasitas serta menjamin SDM yang sudah di interfensi telah siap untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat.

1.5 Informasi Ringkas Organisasi dan proyek

Nama Proyek: PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT UNTUK DAPAT MENGELOLA KAWASAN PERIKANAN DI KAWASAN KONSERVASI DAN MELAKUKAN PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT DI RAJA AMPAT DAN LAUT SAWU	
Durasi Proyek:	19 Bulan
Lokasi Proyek/Kegiatan	SAP RAJA AMPAT, SAP WAIGEO SEBELAH BARAT, KKPD SELAT DAMPIER dan TNL SAWU
Total Hibah Dari ICCTF	Rp 18.820.0000
Dana hibah yang sudah diterima	Rp 18.327.061.326
Dana hibah ICCTF yang sudah digunakan	Rp 18.701.144.609
Jumlah penerima manfaat langsung	231 orang masyarakat, staf lokal dan staf nasional yang mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat
Jumlah penerima manfaat tidak langsung	Lebih dari 150 orang
Nama organisasi/lembaga/perguruan tinggi (unit)	Yayasan TERANGI
Direktur Organisasi/lembaga/Unit Perguruan Tinggi	Safran Yusri
Manajer proyek	Idris

2. PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Kerangka Kerja (*Logical Framework*)

Uraian	Indikator	Cara Pembuktian	Asumsi Risiko (R) /Mitigasi (M)
Sasaran 1: Penguatan kelembagaan pengawasan kawasan konservasi berbasis masyarakat	1. Tersedianya legalitas kelembagaan pengawas 2. Terbentuknya satu forum POKMASWAS di setiap provinsi target sebagai wadah pembelajaran, koordinasi dan komunikasi	1. Copy SK kelompok POKMASWAS 2. Laporan kegiatan forum 3. SOP dan dokumen rencana pengawasan	Resiko: Tidak ada kelompok di lokasi target dan tidak ada yang bersedia masuk kelompok M : Menyesuaikan dengan kondisi setempat
Output 1.1 Legalitas POKMASWAS tingkat kabupaten dan provinsi di Laut Sawu dan Raja Ampat	1. Adanya 18 kelompok pengawas yang didampingi untuk penguatan kelembagaan dan mendapatkan SK POKMASWAS 2. Ada 18 rencana pengawasan dan SOP yang dibuat dan diimplementasikan	1. Laporan kegiatan fasilitasi 2. SK POKMASWAS 3. Dokumen rencana pengawasan dan SOP 4. Laporan kegiatan	R: 1. Tidak ada kelompok pengawas 2. Terjadi Perubahan aturan POKMASWAS M: 1. Mengaktifkan kembali kelompok pengawas sebelumnya dan mengikuti peraturan yang berlaku 2. Menyesuaikan dengan aturan yang berlaku
Output 1.2 Dukungan pertemuan forum POKMASWAS	1. 2 kali kegiatan rapat koordinasi forum POKMASWAS di Laut Sawu terlaksana 2. 2 kali kegiatan rapat koordinasi forum POKMASWAS di Raja Ampat terlaksana 3. 3 kali pertukaran pembelajaran antar POKMASWAS Terlaksananya	1. Dokumentasi kegiatan fasilitasi rapat koordinasi forum POKMASWAS di Laut Sawu dan Raja Ampat 2. Dokumentasi pertukaran pembelajaran antar POKMASWAS 3. Dokumen pembelajaran POKMASWAS	R: Adanya perubahan peraturan terkait POKMASWAS M : Penyesuaian dengan peraturan baru terkait POKMASWAS
Sasaran 2.: Terbangunnya kapasitas untuk menuju keberlanjutan kelembagaan POKMASWAS	1. Tersedianya 18 rencana kerja POKMASWAS yang dikembangkan oleh kelompok untuk keberlanjutan pembiayaan kelompok 2. Ada 30 orang POKMASWAS di Laut Sawu dan 30 orang POKMASWAS di Raja Ampat bertambah pengetahuan dan keterampilannya dalam pengawasan berbasis masyarakat	1. Dokumen rencana pembiayaan 2. Sertifikat kompetensi dan sertifikat selam lanjutan 3. Dokumen rencana kerja pemantauan dan kegiatan pemantauan 4. Laporan pelatihan 5. Dokumen laporan kegiatan dan prosiding workshop	R :Tidak adanya akses sumber dana lain untuk kegiatan POKMASWAS M : Membangun alternatif sumber dana lainnya R: Tidak semua peserta lulus sertifikasi kompetensi M: Menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan peserta sertifikasi

	3. Ada 30 orang POKMASWAS di Laut Sawu dan 30 orang POKMASWAS di Raja Ampat meningkat kapasitasnya dalam pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat		R: Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan untuk naik jenjang selam tingkat lanjut M: Menyesuaikan dengan ketersediaan jenjang selam yang ada
	4. Ada 10 orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu dan 10 orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat tersertifikasi SKKNI monitoring dan evaluasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat tingkat operator		R: Anggota POKMASWAS banyak yang tidak berminat mengikuti workshop M: Sosialisasi dan pendekatan program lebih intens kepada POKMASWAS dan instansi terkait
	5. Ada 20 orang masyarakat dan staf daerah yang tersertifikasi selam lanjutan		R : Kelompok target tidak mampu menyelesaikan sertifikasi M: Pemilihan calon peserta yang disesuaikan dengan kondisi dan minat
	6. Ada 36 orang masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam financial inclusion dan pendanaan berkelanjutan		R: Kelompok target tidak mampu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan mandiri M: Melakukan pendekatan pada pemerintah daerah hingga desa untuk kemungkinan pendanaan berkelanjutan
Output 2.1 SDM POKMASWAS yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan berbasis masyarakat di Laut Sawu dan Raja Ampat	1. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 1 tentang dasar-dasar pengawasan.	1. Dokumen laporan kegiatan dan prosiding workshop	R: Anggota POKMASWAS banyak yang tidak berminat mengikuti workshop M: Adaptasi dan penyesuaian metode workshop
	2. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 2 tentang pengawasan tingkat lanjut		R: Penilaian pre test dan post test peserta tidak sesuai target dalam workshop M: Sosialisasi dan pendekatan program lebih intens kepada POKMASWAS dan instansi terkait
	3. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 3 tentang pengawasan dengan teknologi aerial.		R: Masyarakat kesulitan mengimplementasi pengawasan berbasis teknologi aerial M: Pemilihan metode dan penyiapan alat bantu ajar yang sesuai dengan kondisi setempat

	4. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 1 tentang dasar-dasar pengawasan.		R: Anggota POKMASWAS banyak yang tidak berminat mengikuti workshop M: Adaptasi dan penyesuaian metode workshop
	5. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 2 tentang pengawasan tingkat lanjut		R: Penilaian pre test dan post test peserta tidak sesuai target dalam workshop M: Sosialisasi dan pendekatan program lebih intens kepada POKMASWAS dan instansi terkait
	6. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 3 tentang pengawasan dengan teknologi aerial		R: Masyarakat kesulitan mengimplementasi pengawasan berbasis teknologi aerial M: Pemilihan metode dan penyiapan alat bantu ajar yang sesuai dengan kondisi setempat
Output 2.2 SDM POKMASWAS yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat di Laut Sawu dan Raja Ampat	1. 30 orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop monitoring dan evaluasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat	1. Dokumen laporan kegiatan dan prosiding workshop 2. Laporan Kegiatan Sertifikasi 3. Copy sertifikat kompetensi	R: Tidak semua peserta lulus sertifikasi kompetensi M: Menambah jumlah peserta workshop dan metode assement akan dipilih sesuai kondisi peserta
	3. 30 orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop monitoring dan evaluasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat		
Output 2.3 Masyarakat dan staf daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam hal penyelaman di Raja Ampat	1. Ada 20 masyarakat dan staf daerah tersertifikasi penyelaman tingkat lanjut	Dokumen laporan kegiatan sertifikasi selam tingkat lanjut	R: Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan untuk naik jenjang selam tingkat lanjut M: Menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan peserta sertifikasi
		Copy Sertifikat selam jenjang lanjut	
Sasaran 3 Tersedianya dukungan sarana, prasarana dan operasional POKMASWAS	1. Terbangunnya 7 unit menara pengawas di lokasi target	Laporan BAST dalam bentuk : 1. Laporan kegiatan 2. Fisik bangunan 3. Fisik peralatan 4. Fisik kapal	R: Tidak tersedia lahan pembangunan dan adanya penolakan dari masyarakat M: sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah
	2. Tersedianya 9 perahu bagi 9 POKMASWAS di lokasi target	Laporan BAST	R: Tidak tersedianya bahan yang sesuai dengan kriteria M: Melakukan modifikasi dan penyesuaian bahan dan lahan sesuai kondisi lapangan

	3. Tersedianya peralatan pengawasan untuk 18 POKMASWAS	Laporan BAST	
Output 3.1 Menara pengawas untuk POKMASWAS	1. Tersedianya perizinan dan kajian cepat resiko lingkungan dan sosial untuk pembangunan menara pengawas.	1. Ijin Lingkungan 2. Laporan kajian cepat lingkungan dan sosial 3. Dokumen DED 4. Dokumen laporan kegiatan pembangunan 5. Dokumen berita acara penitipan 6. SOP penggunaan peralatan pengawasan	R: 1. Ada penolakan dari masyarakat 2. Terjadi bencana, dan konflik di masyarakat tidak besar. 3. Tidak tersedianya lahan untuk pembangunan menara pengawas M: 1. Kordinasi, sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan 2. Mengikutsertakan perwakilan adat dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan 3. Memindahkan lokasi pembangunan ke lokasi yang diizinkan masyarakat
	2. Tersedianya DED menara pengawas.		
	3. Terbangunnya 3 menara pengawas di Raja Ampat dan 4 menara pengawas di Laut Sawu		
	4. Tersedianya SOP penggunaan menara pengawas		
Output 3.2 Perahu pengawas untuk operasional POKMASWAS	1. Terdistribusinya 4 perahu pengawas kepada 4 Kelompok POKMASWAS di Raja Ampat	1. Berita acara penitipan 2. Laporan pengadaan 3. laporan monev 4. Dokumen SOP penggunaan kapal	R :Adanya keterlambatan pendistribusian M: Modifikasi atau Penyesuaian mekanisme distribusi kapal
	2. Terdistribusinya 5 perahu pengawas kepada 5 Kelompok POKMASWAS di Laut Sawu.		
	3. Tersedianya SOP penggunaan Kapal		
Output 3.3 Peralatan untuk operasional pengawasan	1. Tersedianya peralatan pengawasan untuk 18 POKMASWAS.	1. Berita acara penitipan 2. Dokumen SOP penggunaan peralatan pengawasan	R: Tidak tersedianya sarana prasarana pendukung di lokasi M: Modifikasi peralatan yang sesuai dengan sarana pendukung
	2. Tersedianya SOP penggunaan peralatan pengawasan		
Sasaran 5. Pengawasan implementasi proyek untuk mendukung capaian tujuan	1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program bulanan, midterm dan tahunan	1. dokumen laporan monitoring dan evaluasi 2. dokumen laporan keuangan 3. Dokumentasi proyek 4. Dokumen komunikasi dan publikasi proyek	R: Adanya kendala pada implementasi kegiatan. M: modifikasi atau adaptasi sistem monitoring dan evaluasi
	2. Terlaksananya pendampingan audit pelaksanaa proyek di NTT dan Raja Ampat		
	3. Implementasi proyek terdesiminasi dan terdokumentasi dengan baik		

Output 5.1 Dukungan pemantauan dan evaluasi kegiatan proyek	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi keuangan proyek di NTT dan Raja Ampat	dokumen laporan monitoring dan evaluasi bulanan, midterm atau annual dan laporan monev reguler program	R: Adanya kendala pada implementasi kegiatan. M: modifikasi atau adaptasi sistem monitoring dan evaluasi
	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Reguler program di NTT dan Raja Ampat		
Sasaran 6 Pengelolaan proyek untuk mencapai tujuan proyek	1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi proyek melalui kick off meeting	dokumen laporan monitoring dan evaluasi	R: Adanya kendala pada implementasi kegiatan. M: modifikasi atau adaptasi sistem monitoring dan evaluasi
	2. Tersedianya operasional pengelolaan proyek dan tim pengelola proyek	Dokumen kegiatan kick off meeting	
Output 6.1 Dukungan sosialisasi kegiatan proyek	1. Terlaksananya kick off meeting di awal program	dokumen laporan Kick off meeting	R: Tidak ada bencana, dan konflik di masyarakat tidak besar. M: Penyesuaian kegiatan
Output 6.2 Dukungan tim pengelola proyek	1. Operasional tim pengelola proyek.	dokumen laporan keuangan dan laporan kegiatan staf	R: Adanya kendala pada implementasi kegiatan. M: modifikasi atau adaptasi sistem pelaporan

2.2. Kemajuan dan Pencapaian Masing-masing Output

No	Output	Indikator/Target	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi
1.1	Legalitas POKWASMAS tingkat kabupaten dan provinsi di Laut Sawu dan Raja Ampat	1. Adanya SK kelompok pokmaswas dari tingkat Desa sampai Kabupaten yang teridentifikasi di Raja Ampat dan Laut Sawu 2. Terlaksannya kegiatan pendampingan POKMASWAS di Raja Ampat dan Laut Sawu	A. Sudah ada SK POKMASWAS tingkat provinsi untuk pokmaswas di Raja Ampat yaitu : 1. Pokmaswas Wifoo Misol 2. Pokmaswas Indaf 3. Pokmaswas Raswan 4. Pokmaswas Barawan Jaya 5. Pokmaswas Mambri 6. Pokmaswas Imuri 7. Pokmaswas Inmam 8. Pokmaswas Kurafor 9. Pokmaswas Baustar B. Sudah ada SK POKMASWAS tingkat Provinsi untuk Pokmaswas di Laut Sawu yaitu : 1. Pokmaswas Faduli Tasi 2. Pokmaswas Cinta Laut 3. Pokmaswas Sotimori 4. Pokmaswas Mulut Seribu 5. Pokmaswas Tri Jaya 6. Pokmaswas Taruna Selat Raijua 7. Pokmaswas Hidup Rukun 8. Pokmaswas Manoholo Hundihuk 9. Pokmaswas Manoholo Onatali 10. Pokmaswas Peduli Lingkungan Pesisir 11. Pokmaswas Humma 12. Pokmaswas Ngamba Daha 13. Pokmaswas Ratu Pantai Selatan 14. Pokmaswas Lonto Leok 3. Terlaksananya kegiatan pendampingan kegiatan POKMASWAS baik di Raja Ampat maupun Laut Sawu.	100%

1.2	Dukungan pertemuan forum POKMASWAS	1. Terlaksananya 2 kali kegiatan rapat koordinasi forum POKMASWAS di Laut Sawu. 2. Terlaksananya 2 kali kegiatan rapat koordinasi forum POKMASWAS di Raja Ampat. 3. Terlaksananya 3 kali pertukaran pembelajaran antar POKMASWAS.	1. Sudah terlaksana 2 kali kegiatan rapat koordinasi forum POKMASWAS di Laut Sawu : - Pertemuan pertama dilakukan di Labuan Bajo dan Pertemuan Kedua dilakukan di Kupang. 2. Sudah terlaksana 2 kali kegiatan rapat koordinasi forum POKMASWAS di Raja Ampat : - Pertemuan pertama dilakukan di Kupang dan Pertemuan kedua dilakukan di Waisai 3. Pertukaran pembelajaran antar POKMASWAS dilakukan hanya 1 kali, dikarenakan waktu implementasi yang tidak cukup	95%
1.3	Peta partisipatif area kerja POKMASWAS	1. Peta area kerja masing-masing POKMASWAS 2. Kesepakatan peta area kerja	1. Sudah ada 21 Peta Area Kerja masing-masing POKMASWAS 2. Sudah ada dokumen kesepakatan area kerja antar POKMASWAS dalam satu Kawasan	100%
2.1	SDM POKMASWAS yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi di Laut Sawu dan Raja Ampat	1. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 1 tentang dasar-dasar pengawasan. 2. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 2 tentang pengawasan tingkat lanjut 3. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 3 tentang pengawasan dengan teknologi aerial. 4. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti	A. Workshop Pengawasan di Raja Ampat : 1. Sebanyak total 22 orang POKMASWAS di Raja Ampat telah mengikuti workshop pengawasan level 1. 2. Sebanyak total 22 orang POKMASWAS di Raja Ampat telah mengikuti workshop pengawasan level 2. 3. Sebanyak total 22 orang POKMASWAS di Raja Ampat telah mengikuti workshop pengawasan level 3. B. Workshop Pengawasan di TNP Laut Sawu 4. Sebanyak total 35 orang POKMASWAS di TNP laut Sawu telah mengikuti workshop pengawasan level 1. 5. Sebanyak total 35 orang POKMASWAS di TNP laut Sawu telah mengikuti workshop pengawasan level 2. 6. Sebanyak total 35 orang POKMASWAS di TNP laut Sawu telah mengikuti workshop pengawasan level 3.	100%

		workshop pengawasan berbasis masyarakat level 1 tentang dasar-dasar pengawasan. 5. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 2 tentang pengawasan tingkat lanjut 6. Tiga Puluh (30) orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop pengawasan berbasis masyarakat level 3 tentang pengawasan dengan teknologi aerial		
2.2	SDM POKMASWAS yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat di Laut Sawu dan Raja Ampat	1. 30 orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop monitoring dan evaluasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat 2. 10 orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu tersertifikasi SKKNI monitoring dan evaluasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat untuk tingkat operator 3. 30 orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop monitoring dan evaluasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat 4. 10 orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat tersertifikasi SKKNI monitoring dan evaluasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat tingkat operator	A. Workshop pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat di Raja Ampat : 1. Sebanyak total 28 orang POKMASWAS di Raja Ampat telah mengikuti workshop pemantauan ekosistem pesisir. B. Workshop pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat di TNP Laut Sawu 1. Sebanyak total 42 orang POKMASWAS di TNP laut Sawu telah mengikuti workshop workshop pemantauan ekosistem pesisir.	100%

2.3	Masyarakat dan staf daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelaman di Raja Ampat	Ada 20 masyarakat dan staf daerah tersertifikasi penyelaman tingkat lanjut	Total ada 30 orang masyarakat dan staf daerah tersertifikasi selam (20 orang tersertifikasi selam tingkat lanjut di Raja Ampat-Papua Barat dan 10 orang tersertifikasi tingkat pemula/open water di Kupang-NTT)	100%
2.4	SDM Pokmaswas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengenalan financial inclusion untuk mendorong keberlanjutan keuangan lembaga POKMASWAS	1. Sebanyak 20 orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop financial inclusion dan pendanaan berkelanjutan 2. Sebanyak 16 orang anggota POKMASWAS dari Raja Ampat mengikuti workshop financial inclusion dan pendanaan berkelanjutan 3. Ada 18 rencana pendanaan berkelanjutan tersedia dan dapat diadopsi oleh kelompok	1. Sebanyak 43 orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop financial inclusion dan pendanaan berkelanjutan di Bali, Bersama kelompok POKMASWAS Tirta Segara. 2. POKMASWAS dari Raja Ampat tidak bisa melaksanakan workshop financial inclusion dan pendanaan berkelanjutan, karena keterbatasan waktu implementasi dan bersamaan dengan kegiatan workshop pemantauan ekosistem pesisir di Waisai 3. Ada 14 Dokumen rencana pendanaan berkelanjutan tersedia dan dapat diadopsi oleh kelompok	98%
3.1	Menara pengawas untuk POKMASWAS	1. Tersedianya perizinan dan kajian cepat resiko lingkungan dan sosial untuk pembangunan menara pengawas. 2. Tersedianya DED menara pengawas. 3. Terbangunnya 3 menara pengawas di Raja Ampat dan 4 menara pengawas di Laut Sawu 4. Tersedianya SOP penggunaan menara pengawas	1. Sudah tersedia perizinan dan laporan kajian cepat resiko lingkungan dan sosial untuk pembangunan menara pengawas. 2. Sudah tersedia 7 Dokumen DED menara pengawas. 3. Pembangunan menara pengawas di TNP Laut sawu telah selesai sebanyak 4 buah dengan rincian 1 di kabupaten Rote Ndao, 1 unit di Kabupaten Sabu Raijua, 1 unit di Kabupaten Sumba Barat Daya dan 1 Unit di Kabupaten Manggarai Barat. 4. Pembangunan menara pengawas di Raja Ampat telah selesai sebanyak 3 unit, dengan rincian 1 unit di kampung Meosmanggara, 1 unit di Kampung Sauwandarek, dan 1 unit di Kampung Harapan Jaya. 5. Ada 7 SOP penggunaan menara pengawas	100%

3.2	Perahu pengawas untuk operasional POKMASWAS	1. Terdistribusinya 4 perahu pengawas kepada 4 Kelompok POKMASWAS di Raja Ampat 2. Terdistribusinya 5 perahu pengawas kepada 5 Kelompok POKMASWAS di Laut Sawu. 3. Tersedianya SOP penggunaan Kapal	1. Telah tersedia dan terdistribusinya 4 perahu pengawasan untuk pokmaswas di Raja Ampat. 2. Telah tersedia dan terdistribusinya 5 perahu pengawasan untuk POKMASWAS di Laut Sawu. 3. telah tersedia 9 SOP penggunaan perahu pengawas	100%
3.3	Peralatan untuk operasional pengawasan	1. Tersedianya peralatan pengawasan untuk 18 POKMASWAS. 2. Tersedianya SOP penggunaan peralatan pengawasan	1. Sudah tersedianya peralatan pengawasan untuk 23 kelompok pokmaswas. 2. Sudah tersedia 23 SOP penggunaan peralatan pengawasan	100%
3.4	Dukungan operasional mingguan POKWASMAS	1. Tersedianya skema penyaluran operasional mingguan POKMASWAS 2. Terlaksananya kegiatan pengawasan 1x seminggu dengan bantuan operasional selama 14 bulan	1. Sudah ada 2 dokumen hasil FGD penyaluran operasional POKMASWAS 2. Sudah terlaksana kegiatan pengawasan oleh 21 POKMASWAS selama 12 bulan, karena proses implementasi yang dimulai agak terlambat sehingga proses pengawasan oleh pokmaswas juga ikut mundur karena harus ada kegiatan training terkait pengawasan terlebih dahulu.	100%
4.1	Seminar nasional strategi pengawasan berbasis masyarakat	Tersedianya strategi pengawasan bersama (<i>join patrol</i>) yang dapat diterapkan.	1. Sudah dilakukan kegiatan seminar di Jakarta dengan melibatkan sekitar 92 orang dari berbagai instansi baik daerah maupun pusat dan juga perwakilan anggota pokmaswas dari Raja Ampat, Ntt dan NTB	100%
5.1	Dukungan pemantauan dan evaluasi kegiatan proyek	1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi keuangan proyek di NTT dan Raja Ampat 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Reguler program di NTT dan Raja Ampat	Sudah dilakukannya monev program untuk di Raja Ampat dan Laut Sawu	100%

5.2	Dukungan pendampingan audit proyek di NTT dan Raja Ampat	1. Terlaksananya pendampingan audit pelaksanaan proyek di NTT. 2. Terlaksananya pendampingan audit pelaksanaan proyek di Raja Ampat	1. Sudah dilakukan pendampingan audit pelaksanaan proyek di NTT meliputi kabupaten Manggarai, Sumba Barat Daya, Rote Ndao dan Sabu Raijua. 2. Sudah dilakukan pendampingan audit pelaksanaan proyek di Raja Ampat meliputi Kampung Mutus, Meosmanggara, Meosarar, Sawandarek dan Harapan Jaya.	100%
5.3	Annual/project closing di NTT dan Raja Ampat	1. Terlaksananya Annual/project closing proyek proyek di NTT 2. Terlaksananya Annual/project closing proyek proyek di Raja Ampat	1. Sudah terlaksana projec closing proyek untuk POKMASWAS NTT dilaksanakan di Bali , dimana kegiatannya dilakukan setelah kegiatan financial inclusion dan pertukaran pembelajaran. 2. sudah terlaksana project closing proyek untuk POKMASWAS Raja Ampat, kegiatannya dilakukan setelah kegiatan pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat	100%
5.4	Dukungan publikasi dan komunikasi proyek	1. Terlaksananya ekspos atau media visit kegiatan di NTT dan Raja Ampat 1. adanya materi publikasi dan komunikasi proyek 2. terlaksananya publikasi dan komunikasi proyek 3. Tersedianya staf KM	1. sudah terlaksana ekspos dan media visit di Kupang-NTT dan di Sorong -Papua barat. 2.Sudah ada materi publikasi dan komunikasi yang dibuat dalam bentuk cetak (booklet) dan soft file 3. Sudah ada sosialisasi dan publikasi proyek dalam bentuk booklet dan internet (portal, FB dan IG) 4. Sudah ada materi pdokumentasi berupa film singkat	100%
6.1	Dukungan Sosialisasi kegiatan proyek	1. Terlaksananya kickoff meeting program di Laut Sawu dan Raja Ampat	1. Teridentifikasi lokasi kickoff meeting di sorong dan Wayag, Raja Ampat 2. Pembentukan panitia, dan list undangan kegiatan kick off meeting 3. Sudah dilakukannya kickoff meeting di Raja Ampat	100%
6.2	Dukungan tim pengelola proyek	1. Adanya Operasional tim pengelola proyek 2. adanya staf pengelola proyek	1. sudah tersedia operasional pengelola proyek 2. sudah ada staf pengelola proyek	100%

2.2. Hambatan dalam Pencapaian output dan Upaya Mengatasi

a. Sertifikat lahan yang bermasalah.

Lokasi pembangunan menara pengawas di Sumba Barat Daya (SBD), mengalami hambatan terkait penyediaan lahan pembangunan yang mana lahan tersebut bermasalah terkait sertifikat kepemilikan lahan tersebut. Pemilik lahan sudah bersedia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan menara pengawas, salah satu persyaratan pengurusan SPPL adalah adanya foto copi sertifikat tanah atau pernyataan lahan tidak dalam sengketa. Hal ini menyebabkan proses pembangunan menara pengawas tidak bisa dilakukan di lokasi tersebut.

Solusi masalah sertifikat tersebut, TERANGI berkoordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional di SBD untuk mendapatkan foto copi sertifikat tanah tersebut. Namun ternyata sertifikat sudah dikuaskan oleh pemilik tanah untuk diambil oleh orang lain.

Proses berlanjut dan pemegang sertifikat sudah ditemukan serta melakukan koordinasi serta sosialisasi untuk penggunaan lahan, namun pemegang sertifikat menginginkan lokasi tersebut dibayarkan. Karena hal itu tidak bisa difasilitasi oleh TERANGI, maka diputuskan untuk pindah ke lokasi lain. Saat ini proses pemilihan lokasi sudah di koordinasikan dengan pihak pemda kabupaten Sumba Barat Daya.

b. Isu adanya konflik di masyarakat terkait adanya bantuan

Mitra lokal mengingatkan tim TERANGI untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan program terutama terkait bantuan proyek, karena jika terjadi konflik di masyarakat maka akan berdampak pada tidak tercapainya capaian program terkait dukungan masyarakat dalam pengawasan kawasan konservasi berbasis masyarakat.

Proses untuk mengatasi masalah ini dilakukan dengan melakukan diskusi intensif dengan pemda, pengelola kawasan dan juga mitra pelaksana lainnya seperti PILI. Beberapa hasil diskusi mengarah pada pembuatan SOP dalam pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat dengan melibatkan pihak pemda (Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten maupun provinsi), pihak pemerintah pusat (BKKPN Kupang) serta pemerintah kampung/desa.

c. Pelaporan oleh kelompok di beberapa wilayah jarang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Solusi terkait permasalahan tersebut adalah melakukan pelaporan intensif kepada semua mitra terkait sehingga bisa cepat ditindaklanjuti oleh mitra lainnya.

d. Terjadinya gesekan di level bawah terkait perizinan kapal yang boleh dan tidak boleh masuk dalam kawasan.

Solusi terkait masalah tersebut adalah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait izin kapal yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah setempat.

e. Kelangkaan BBM sering menjadi kendala untuk wilayah Raja Ampat, sehingga kegiatan pengawasan dialihkan ke kegiatan penyadartahuan atau bersih pantai.

Solusi terhadap masalah tersebut adalah dengan melakukan kegiatan penyadartahuan di level masyarakat bawah terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan didalam kawasan konservasi, biota laut yang dilindungi, alat tangkap yang ramah lingkungan dan ekosistem pesisir.

f. Kegiatan penangkapan perikanan merusak dominan disebabkan oleh masyarakat luar wilayah atau terkadang dari provinsi lain.

Solusi untuk permasalahan ini adalah melibatkan dan komunikasi dengan provinsi lainnya terkait nelayan lintas provinsi yang melakukan penangkapan di wilayah provinsi lain.

2.4. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran tahun 2020-2022 sebesar Rp 18.701.144.609 dari anggaran proyek sebesar Rp 18.820.200.000 sehingga persentase penyerapan anggaran proyek pada tahun 2022 mencapai sebesar 99,37 %.

No	Output	Bobot output (%)	Realisasi capaian indikator/target	% Realisasi	Budget AWP (IDR)	Budget AWP (USD)	Budget Expenditure (IDR)	Budget Expenditure (USD)
1.1	Legalitas POKWASMAS tingkat kabupaten dan provinsi di Laut Sawu dan Raja Ampat	10	1. ada 14 SK POKMASWAS level provinsi di Laut Sawu/10 SK level provinsi 2. Ada 9 SK POKMASWAS level provinsi di Raja Ampat/ 8 SK level provinsi 3. Ada 14 Rencana Pengawasan POKMASWAS di Laut Sawu 4. Ada 9 Rencana Pengawasan POKMASWAS di Raja Ampat	100%	594.240.000	42.466	586.340.724	41.881
2	Ada 18 rencana pengawasan dan SOP yang dibuat	4	1. Sudah ada 14 rencana pengawasan dan SOP di Laut Sawu 2. Sudah ada 9 rencana pengawasan dan SOP di Raja Ampat	100%	118.200.000	8.444	116.061.032	8.290
1.2	Dukungan pertemuan forum POKWASMAS	4	Sebanyak Dua kali Rapat Koordinasi forum POKMASWAS telah dilakukan di Raja Ampat dan Laut Sawu	100%	825.814.000	58.987	823.814.930	58.844

1.3	Peta partisipatif area kerja POKMASWAS	4	1. Sudah ada 14 dokumen peta area pengawasan dan kesepakatan peta area kerja POKMASWAS di Laut Sawu/10 2. Sudah ada 9 dokumen peta area pengawasan dan kesepakatan area kerja/8	100%	1.371.769.000	97.984	1.360.494.547	97.178
2.1	SDM POKMASWAS yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi di Laut Sawu dan Raja Ampat	6	1. Telah ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang pengawasan level1 tentang dasar-dasar pengawasan 11 kelompok POKMASWAS di Laut Sawu (35 orang) sebagai peserta Workshop/20 orang 2. Telah ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang pengawasan level 2 tentang pengawasan tingkat lanjut untuk 11 kelompok POKMASWAS di Laut Sawu (35 orang) sebagai peserta Workshop/20 orang 3. Telah ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang pengawasan level 3 tentang pengawasan berbasis teknologi aerial untuk 14 kelompok POKMASWAS di Laut Sawu (35 orang) sebagai peserta Workshop/20 orang 4. Telah ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang	100%	1.944.329.020	138.881	1.942.565.623	138.755

			pengawasan level 1 tentang dasar-dasar pengawasan 9 kelompok POKMASWAS di Raja Ampat (20 orang) sebagai peserta Workshop/10 orang 5. Telah ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang pengawasan level 2 tentang pengawasan tingkat lanjut kepada 9 kelompok POKMASWAS di Raja Ampat (20 orang) sebagai peserta Workshop/10 orang 4. Telah ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang pengawasan level 3 tentang pengawasan berbasis teknologi aerial untuk 9 kelompok POKMASWAS di Raja Ampat (22 orang) sebagai peserta Workshop/10 orang					
2.2	SDM POKMASWAS yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat di Laut Sawu dan Raja Ampat	6	Sudah dilakukan kegiatan workshop pemantauan ekosistem pesisir di Laut Sawu dan diikuti oleh 42 orang dan di Raja Ampat diikuti oleh 28 orang	100%	565.941.000	40.424	552.083.156	39.435

2.3	Masyarakat dan staf daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelaman di Raja Ampat	6	30 masyarakat dan staf daerah tersertifikasi penyelaman tingkat dasar dan tingkat lanjut/20 orang	100%	894.000.000	63.857	893.464.101	63.819
2.4	SDM POKMASWAS yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengenalan financial inclusion untuk mendorong keberlanjutan keuangan lembaga POKMASWAS.	5	1. Sebanyak 43 orang anggota POKMASWAS dari Laut Sawu mengikuti workshop financial inclusion dan pendanaan berkelanjutan di Bali, Bersama kelompok POKMASWAS Tirta Segara. 2. POKMASWAS dari Raja Ampat tidak bisa melaksanakan workshop financial inclusion dan pendanaan berkelanjutan, karena keterbatasan waktu implementasi dan bersamaan dengan kegiatan workshop pemantauan ekosistem pesisir di Waisai. 3. Ada 14 Dokumen rencana pendanaan berkelanjutan tersedia dan dapat diadopsi oleh kelompok	98%	596.104.000	42.579	291.069.388	20.791
3.1	Menara pengawas untuk POKMASWAS	8	- Telah terbangun 7 menara pengawas/7 - sudah ada 7 SOP Menara pengawas/7	100%	3.957.375.920	282.670	3.939.862.933	281.419

3.2	Perahu pengawas untuk operasional POKMASWAS	8	-Sudah Tersedianya 4 Perahu Pengawas di Raja Ampat -Sudah Tersedianya 5 Perahu Pengawas di Laut Sawu	100%	3.376.736.000 -	241.195 -	3.376.681.802 -	241.192 -
3.3	Peralatan untuk operasional pengawasan	5	1. sudah tersedianya peralatan pengawasan untuk 23 kelompok pokmaswas sudah tersedia/18 2. sudah ada 23 dokumen SOP penggunaan perataan pengawasan di Sabu	100%	1.040.700.000	74.336	1.039.625.000	74.259
3.4	Dukungan operasional mingguan POKWASMAS	5	1. Sudah ada 2 dokumen sop penyaluran operasional pengawasan POKMASWAS 2. sudah ada 23 POKMASWAS yang melakukan pengisian log book 3. sudah ada 23 POKMASWAS yang membuat laporan pengawasan	100%	956.000.000	68.286	954.000.000	68.143
4.1	Seminar nasional strategi pengawasan berbasis masyarakat	5	Sudah dilakukan seminar strategi pengawasan berbasis masyarakat	100%	419.500.000	29.964	418.635.199	29.903
5.1	Dukungan pemantauan dan evaluasi kegiatan proyek	4	1. sudah terlaksana monev infrastruktur di Raja Ampat dan Laut Sawu 2. sudah Terlaksananya monitoring dan evaluasi Reguler program di NTT dan Raja Ampat	100%	221.500.000 -	15.821 -	220.750.962 -	15.768 -

5.2	Dukungan Pendampingan audit proyek di NTT dan Raja Ampat	4	1. Sudah terlaksananya dukungan pendampingan audit proyek di NTT 2. Sudah terlaksananya dukungan pendampingan audit program di NTT dan Raja Ampat	100%	64.100.000 -	4.579 -	63.900.000 -	4.564 -
5.3	Annual/project closing di NTT dan Raja Ampat	4	1. Sudah terlaksana projec closing proyek untuk POKMASWAS NTT dilaksanakan di Bali , dimana kegiatannya dilakukan setelah kegiatan financial inclusion dan pertukaran pembelajaran. 2. sudah terlaksana project closing proyek untuk POKMASWAS Raja Ampat, kegiatannya dilakukan setelah kegiatan pemantauan ekosistem pesisir berbasis masyarakat	100%		-		-
5.4	Dukungan publikasi dan komunikasi proyek	4	sudah ada media publikasi melalui sosial media lembaga Sudah ada medai pembelajaran daam bentuk poster dan flyer sudah ada film dokumenter tentang pOKMASWAS di Raja Ampat dan Laut Sawu	100%	465.700.000	33.264	464.686.301	33.192
6.1	Dukungan Sosialisasi kegiatan proyek	4	1. Teridentifikasi lokasi kickoff meeting di sorong dan Wayag, Raja Ampat	100%	179.500.000	12.821	178.267.677 -	12.733 -

			2. Pembentukan panitia, dan list undangan kegiatan kick off meeting 3. Sudah dilakukannya kickoff meeting di Raja Ampat					
6.2	Dukungan tim pengelola proyek	8	1. sudah tersedia operasional pengelola proyek 2. sudah ada staf pengelola proyek	100%	665.500.000	47.536	659.065.181	47.076

3. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN PROYEK

3.1. Dampak proyek terhadap masyarakat/pemerintah/lingkungan

Dampak proyek saat ini terhadap masyarakat/pemerintah/lingkungan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang pengawasan, pengelolaan kelompok, pengelolaan keuangan kelompok, bertambahnya networking dan jaringan masyarakat di daerah dengan masyarakat atau kelompok masyarakat dari luar wilayah domisili mereka. Selain itu keterlibatan beberapa pihak aparat dalam membantu pengawasan sudah terlihat dilapangan. Hal ini membantu dalam pengembangan visi terkait pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

3.2. Strategi keberlanjutan proyek

- a. Strategi pertama : Strategi keberlanjutan proyek adalah dengan membangun legalitas formal pada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), selanjutnya dengan adanya legalitas tersebut maka kelompok akan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak sehingga pendanaan mandiri dalam kegiatan akan terbentuk, maka jaminan keberlanjutan pasca proyek berakhir akan terbangun.
- b. Strategi Kedua : kegiatan-kegiatan di bawah COREMAP-CTI diintegrasikan dengan kegiatan pengelola kawasan konservasi dan pihak terkait lainnya. POKMASWAS akan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dan Provinsi Papua Barat, unit Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan satuan unit pengelola kawasan konservasi, seperti Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (BLUD UPTD), Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat dalam hal pemantauan dan pengawasan sumberdaya pesisir dan laut. Selain itu, catatan pemantauan akan dikumpulkan dan dikelola oleh PSDKK KKP sebagai bahan evaluasi pengawasan pesisir dan laut.
- c. Strategi ketiga, Yayasan TERANGI telah memfasilitasi kelompok untuk membuat kesepakatan untuk berkontribusi ke pengembangan kelompok. Anggota dibiasakan untuk berkomitmen menyisihkan penghasilannya yang didapat dari kegiatan pengawasan harian menjadi modal pengembangan kelompok dan usaha kelompok.
- d. Strategi keempat : Yayasan TERANGI menghubungkan pihak-pihak non pemerintah dan investor konservasi untuk berkontribusi langsung dalam pengembangan kegiatan konservasi yang dapat dilaksanakan oleh POKMASWAS dan kelompok-kelompok binaan unit pengelola kawasan konservasi lainnya.

4. INOVASI DAN TEROBOSAN

- a. Workshop yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring) menjadi salah satu sosialisasi program dan menjaring masukan yang efektif dari berbagai kalangan yang berasal dari berbagai institusi dan daerah.
- b. Menyusun kurikulum yang sudah diujikan kepada beberapa kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang, sehingga dihasilkan sebuah kurikulum pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi pengetahuan dan kebutuhan masyarakat di Laut Sawu dan Raja Ampat.
- c. Pengawasan berbasis teknologi aerial menjadi salah satu inovasi yang diterapkan dalam pengawasan, namun hal ini sebatas akan dilakukan dengan supervisi dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini adalah pihak dinas kelautan dan perikanan propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kepulauan Raja Ampat.

5. PEMBELAJARAN

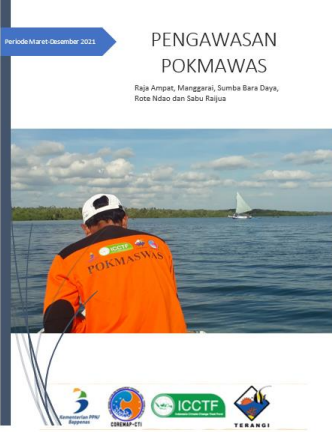
- Sosialisasi dan pelibatan aparat kampung atau desa terhadap pemberian izin pemanfaatan perikanan disuatu wilayah sangat penting untuk mengurangi konflik antar masyarakat lokal dengan nelayan lokal dan atau nelayan andon (seperti : bagan).
- Pendekatan sosialisasi program kepada masyarakat adat di Raja Ampat terutama pelibatan 3 tungku dalam setiap kegiatan POKMASWAS menjadi salah satu kunci mengurangi gesekan sosial dilevel masyarakat.
- Adanya workshop pengembangan kurikulum dan media pembelajaran sangat membantu dalam meramu sebuah kegiatan training yang akan dilakukan kepada masyarakat, sehingga bisa lebih efektif dan efisien.
- Menghubungkan dan membangun komunikasi masyarakat pengawas dari daerah target ke lokasi lain yang sudah mandiri secara kelompok dan pendanaan berkelanjutan

6. REKOMENDASI PENTING SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL/OUTPUT SETELAH PROGAM BERAKHIR DAN TANTANGANNYA

Tantangan saat program berakhir adalah keberlanjutan kelompok masyarakat pengawas yang berbasis sukarela (volunteer) membutuhkan sebuah ketahanan ekonomi anggotanya yang sejalan dengan program pengawasan sumber daya pesisir dan lautan. Hal ini bisa diatasi dengan pengembangan mata pencaharian tambahan atau alternatif kepada anggota kelompok POKMASWAS berupa kegiatan budidaya, wisata atau dalam bidang perikanan tangkap.

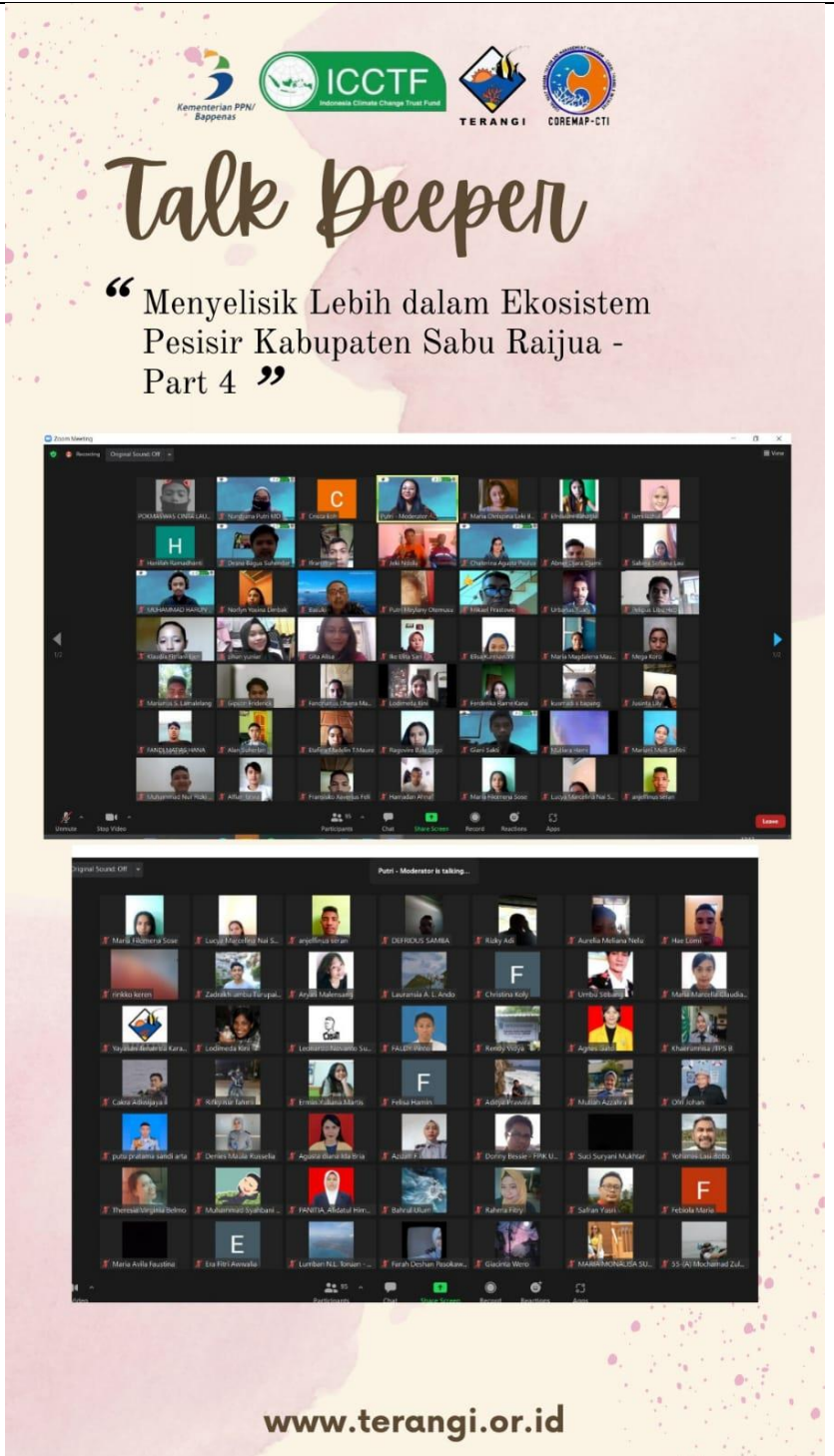
Lampiran 1. Daftar publikasi/produk komunikasi yang dihasilkan

No	Publikasi/produk komunikasi	Keterangan
3.	Flyer Menjadi wisatawan yang bertanggung jawab	
2	Flyer Biota laut dilindungi	
3	Flyer Biota Berbahaya	

4	Dokumen Laporan kegiatan pengawasan POKMASWAS Periode Maret-Desember 2021	
5	Flayer Pengenalan penyu	
6	Komik Singkat Pengenalan Penyu	

7

Publikasi Foto-foto kegiatan deseminasi hasil kegiatan pamantauan biofisik



Kementerian PPN/ Bappenas

ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

TERANGI

COREMAP-CTI

Talk Deeper

“Menyelisik Lebih dalam Ekosistem Pesisir Kabupaten Sabu Raijua - Part 4”

Zoom Meeting

Original Sound ON

Participants: 100

Zoom Meeting

Original Sound ON

Putri - Moderator is talking...

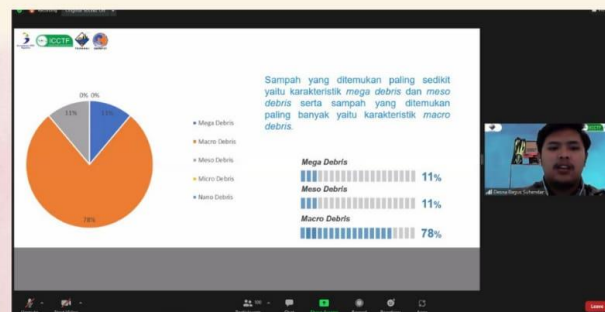
Participants: 100

www.terangi.or.id



Talk Deeper

“Menyelisik Lebih dalam Ekosistem Pesisir Kabupaten Sabu Raijua - Part 4 ”



Pemantik diskusi:

Desna Bagus S, S.Kel
"Sebaran sampah di terumbu karang"

www.terangi.or.id



Talk Deeper

“Menyelisik Lebih dalam Ekosistem Pesisir Kabupaten Sabu Raijua - Part 4 ”



Moderator: **Ni Kadek Putri**



Penanggap diskusi: **Dr. Chaterina Agusta Paulus, M.Si**

www.terangi.or.id



Talk Deeper

“ Menyelisik Lebih dalam Ekosistem
Pesisir Kabupaten Sabu Raijua -
Part 4 ”



Pemantik diskusi:

Muhammad Harun

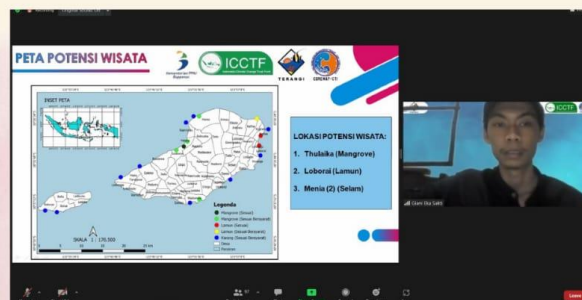
"Kondisi Ekosistem Mangrove"

www.terangi.or.id



Talk Deeper

“Menyelisik Lebih dalam Ekosistem
Pesisir Kabupaten Sabu Raijua -
Part 4 ”



Pemantik diskusi:

Giani Eka Sakti, A.Md.T

"Indeks Kesesuaian Wisata"

www.terangi.or.id

	 terangkarakangindonesia Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia  Pemetaan Partisipatif Kondisi Biofisik Perikanan dan Ekosistem Pesisir di Rote Ndao - TNP Laut Sawu www.terangi.or.id  View Insights Boost Post   Liked by fakhrur_ozzi and 160 others	
--	--	--

Lampiran 2. Ringkasan hasil identifikasi POKMASWAS dan Statusnya

NO	Nama POKMASWAS	Lokasi	Kabupaten	Status
1	Wifoo Misol	Kampung Harapan Jaya	Raja Ampat	SK Provinsi
2	Indaf	Kampung Meosmanggara	Raja Ampat	SK Provinsi
3	Raswan	Kampung Meosarar	Raja Ampat	SK Provinsi
4	Barawan Jaya	Kampung Mutus	Raja Ampat	SK Provinsi
5	Mambri	Kampung Mutus	Raja Ampat	SK Provinsi
6	Imuri	Kampung Sauwandarek	Raja Ampat	SK Provinsi
7	Inmam	Kampung Sauwandarek	Raja Ampat	SK Provinsi
8	Kurafor	Kampung Waisilip	Raja Ampat	SK Provinsi
9	Baustar	Kampung Waisilip	Raja Ampat	SK Provinsi
10	Faduli Tasi	Desa Oeseli	Rote Ndao	SK Provinsi
11	Cinta Laut	Desa Holulai	Rote Ndao	SK Provinsi
12	Sotimori	Desa Sotimori	Rote Ndao	SK Provinsi
13	Mulut Seribu	Desa Daiama	Rote Ndao	SK Provinsi
14	Tri Jaya	Desa Loborai	Sabu Raijua	SK Provinsi
15	Taruna Selat Raijua	Desa Laderaga	Sabu Raijua	SK Provinsi
16	Hidup Rukun	Desa Eilogo	Sabu Raijua	SK Provinsi
17	Manoholo Hundihuk	Desa Hundihuk	Rote Ndao	SK Provinsi
18	Manoholo Onatali	Desa Onatali	Rote Ndao	SK Provinsi
19	Peduli Lingkungan Pesisir	Desa Holulai	Rote Ndao	SK Provinsi
20	Humma	Desa Kenduwela	Sumba Barat Daya	SK Provinsi
21	Ngamba Daha	Desa Atedalo	Sumba Barat Daya	SK Provinsi
22	Ratu Pantai Selatan	Desa Nuca Molas	Manggarai	SK Provinsi
23	Lonto Leok	Desa Satar Lenda	Manggarai	SK Provinsi

Lampiran 3. Sampul depan hasil laporan Pengawasan POKMASWAS

Periode Maret-Desember 2021

PENGAWASAN POKMAWAS

Raja Ampat, Manggarai, Sumba Bara Daya,
Rote Ndao dan Sabu Raijua



Lampiran 4. Contoh pengisian log book oleh pokmaswas.

Identifikasi Pengisian		Peristiwa/ Kejadian															Jumlah Perahu	Jumlah Orang/ Borda	Tindakan/ Aksi				
No.	Tgl/Thn	Lokasi Pelanggaran (lat/long)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	A	B	C	D
1	14/09/2021																						
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							

Catatan Kringkaps:

Petani rumput laut yang sedang panen

14/09/2021

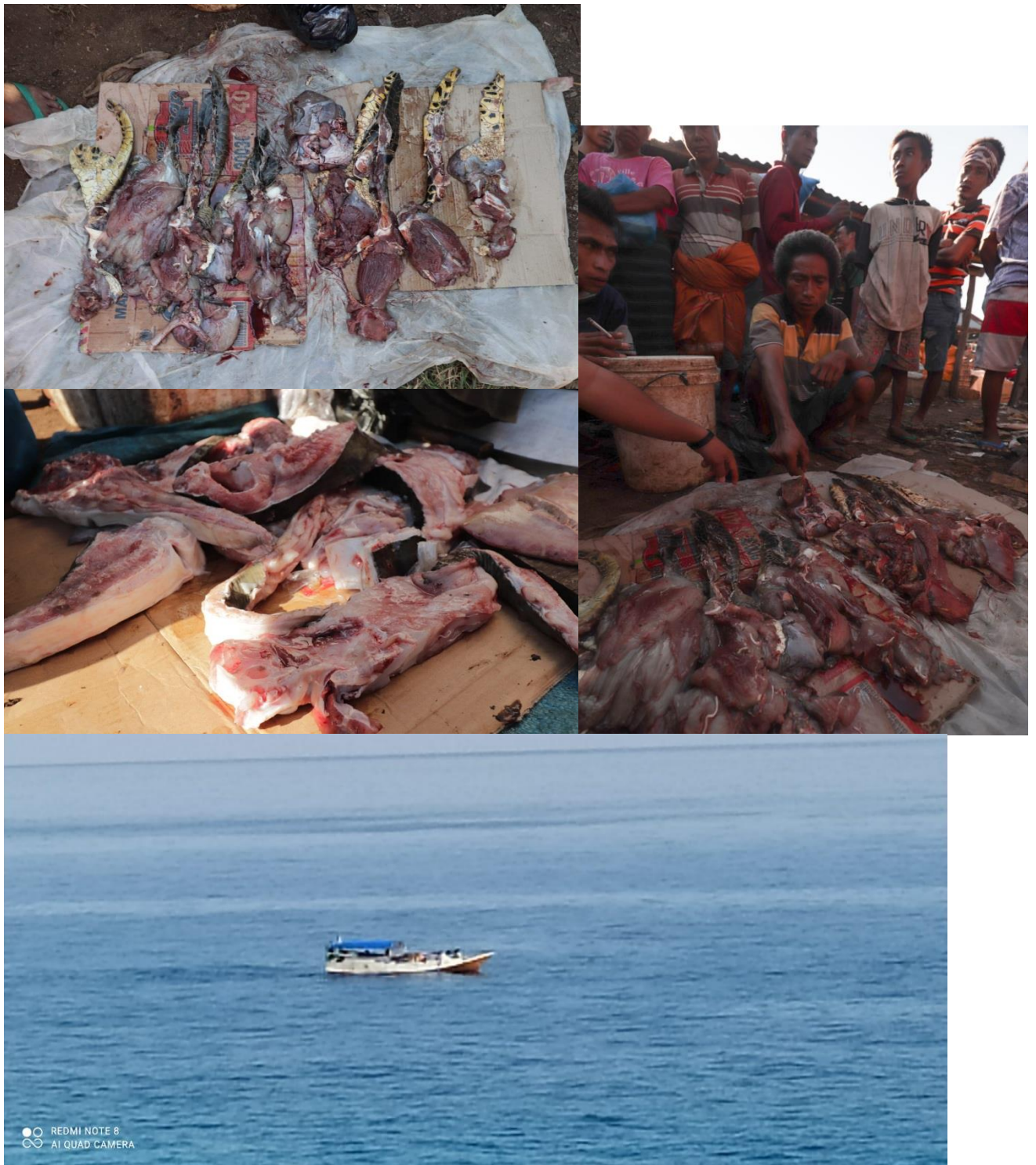
DANDELINA

Keterangan:

1. Menandung dg hook & line
2. Memangkep dengan jaring
3. Memangkep dengan Bahan Peledak
4. Memangkep dengan Racun Ikan/serida
5. Memangkep dengan Alat Terlarang
6. Pengambilan Karang
7. Pencemaran Minyak, Industri, Domestik
8. Kapal Menabrak Karang (Kandas)
9. Memangkep Biotik yang dilindungi
10. Melempar jangkar di Terumbu Karang
11. Menentang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain
12. Menusak padang lamun
13. Penambangan pasir / minyak dan gas/ penambangan mineral / pembangunan tolak yg menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya
14. Sampah Laut
15. Akumulasi Biotik Laut di Lindung (Lumba-lumba, Paus, Dugong, Buaya Air Asin, Kima Raksasa, Ikan Napoleon)
16. Pelanggaran terhadap Zона Konservasi Perairan

4. Laporan ke Satwas PSDK
 5. Informasi ke Kapal Patroli
 6. Informasi ke Aparat Pengawas (KAMLA, TNI, atau POLRI)
 7. Mengambil gambar (Video atau Foto)

Lampiran 5. Kapal dari NTB yang didindikasikan menangkap ikan dengan cara merusak (bom dan Sianida) dan Perdagangan daging penyu di pasar Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.



Lampiran 6. Pembersihan Sampah di Pesisir



Lampiran 7. Pelatihan Selam tingkat dasar kepada masyarakat staf daerah dan staf nasional di Kupang.



Lampiran 8. Workshop Pemantauan Ekosistem Pesisir di Raja Ampat dan Kupang.



